

**PELAKSANAAN SISTEM *ELECTRONIC BUDGETING*
PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Taufik Rahman

NPP. 29.0614

Asdaf Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: taufikrahman.2698@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): In the era of globalization where local financial management mechanisms and systems require the apparatus to be able to perform public services quickly and precisely. So to support its implementation, it is necessary to have a technology-based regional financial management system in order to create clean and clear governance. From the brief description above, the author takes the title "Implementation of the Electronic Budgeting System In The Covid-19 Area in Improving Financial Accountability in the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province". **Purpose:** This study aims to determine how the implementation of E-budgeting in the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province, the factors that hinder the implementation of electronic budgeting, and also the efforts made in overcoming obstacles. **Method:** This research was conducted with a qualitative descriptive research method using an inductive approach. The collection of data/information is done by using interview technique as the main instrument, then it is equipped with documentation. The data analysis technique used by the researcher is in the form of data reduction, data presentation, conclusion drawing, data display, and verification. **Result:** The results of this study indicate that the implementation of the electronic budgeting system at the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province has been going well, this can be proven in helping the process of budget activities from planning, budgeting, to budget control to be faster and accountable. **Conclusion:** From the results obtained in the study, it can be concluded that the electronic budgeting system in order to increase financial accountability runs smoothly and in a timely manner in its implementation, there are several obstacles including the electronic budgeting program or software which is quite difficult to operate, the electronic budgeting website is difficult to access, and the Human Resources are less thorough and consistent. Meanwhile, the efforts made in overcoming this are coordinating with relevant agencies, consulting with electronic budgeting consultants, and utilizing existing human resources.

Keywords: Implementation, Electronic Budgeting system implementation, accountability

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Di era globalisasi dimana mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan daerah, menuntut aparaturnya untuk dapat melakukan pelayanan publik dengan cepat dan tepat. Sehingga untuk mendukung pelaksanaannya diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi agar terciptanya *clean and clear governance*. Dari deskripsi singkat diatas, maka penulis mengambil judul “Pelaksanaan Sistem Electronic Budgeting Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan DI Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta”. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem *electronic budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, faktor-faktor yang menghambat penerapan *electronic budgeting*, dan juga upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan teknik wawancara sebagai instrumen utama, kemudian dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, display data, serta verifikasi.. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *electronic budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dalam membantu proses aktivitas anggaran dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian anggaran menjadi lebih cepat dan akuntabilitas. **Kesimpulan:** Dari hasil yang telah didapatkan dalam penelitian dapat disimpulkan mengenai sistem *electronic budgeting* guna peningkatan akuntabilitas keuangan berjalan lancar dan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu program atau perangkat lunak *electronic budgeting* yang cukup sulit dioperasikan, *website electronic budgeting* sulit diakses, serta Sumber Daya Manusia yang kurang teliti dan konsisten. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan konsultasi dengan konsultan *electronic budgeting*, serta memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada.

Kata kunci : Pelaksanaan sistem Electronic Budgeting, akuntabilitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat sehingga terjadi perubahan kehidupan manusia ke dalam era baru yang berbasis elektronik. Utamanya di sektor pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi dalam menyediakan sumber informasi yang relevan, tepat, akurat, dan lengkap yang dapat dijadikan akses agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menandai tentang pelaksanaan otonomi daerah dengan misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah penyerahan sebagian besar

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. sehingga dalam pelaksanaan oleh aparatur negara. Akuntabilitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan melalui integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.

Provinsi DKI Jakarta dalam sistem pengelolaan keuangan daerahnya yang berbasis teknologi *Electronic Budgeting* sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Atau Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Melalui *Electronic Budgeting*. Persentase mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Adapun implementasi dari terciptanya *electronic budgeting* tersebut merupakan salah satu perwujudan implementasi good governance dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Selain itu *electronic budgeting* merupakan salah satu cara untuk menghadapi permasalahan internal dalam menyusun anggaran yang dimana dengan sistem tersebut proses penganggaran dapat terkunci dan terkontrol sehingga mengurangi manipulasi anggaran maupun korupsi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan *electronic budgeting* sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sehingga prinsip tata kelola keuangan yang baik dapat diterapkan dan berdampak kepada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis elektronik Perkembangan penerapan sistem *electronic budgeting* di DKI Jakarta sampai saat ini relative baik karena dapat mencapai sasaran yaitu untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pada proses perencanaan dan penganggaran anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) serta memperbaiki dan melengkapi sistem sebelumnya yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) yang otoritasnya dipegang oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* pada masa pandemi *Covid-19* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta adapun permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan sistem *electronic budgeting* adalah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang menjadi dasar RAPBD DKI 2020 menjadi sorotan. Sebab, sejumlah usulan anggaran dinilai janggal seperti pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 milyar, serta dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan seperti masih kurangnya kemampuan sistem *electronic budgeting* untuk menelusuri penginputan data secara historis dari seluruh *user*, kurangnya integrasi sistem *electronic budgeting* kepada berbagai stakeholder seperti antara SKPD dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pelaksanaan partisipasi maupun implementasi serta sistem *electronin budgeting*. Penelitian pertama oleh Reviona Juliar, Neneng Dahtiah (2020) dengan judul *Implementasi Kebijakan dan sistem pengendalian Manajemen e-Budgeting dalam mewujudkan Good Governance (kotaBandung)*. Penelitian deskriptif kualitatif ini menunjukkan penerapan e-Budgeting pada penyusunan APBD di pemkot Bandung sudah efektif dan efisien karena sudah memenuhi syarat dalam penerapan struktur pengendalian manajemen , serta penyusunan APBD pada belanja daerah dapat memangkas komponen belanja –belanja yang tidak krusial. Penelitian kedua oleh Rizka dan Desy (2017) dengan judul *Penerapan E- Budgeting Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai Good Governance*. Hasil penelitian deskriptif kualitatif ini adalah peningkatan lebih lanjut dari pengembangan dan peningkatan sistem kualitas sumber daya manusia dan inovasi yang diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik melalui penganggaran. Penelitian selanjutnya oleh Nasution and Atika (2019) dengan judul *Implementasi electronic budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai*. Hasil penelitian deskriptif kualitatif ini pengaruh implementasi *electronic budgeting* dalam meningkatkan akuntabilitas belum maksimal karena penerapan *electronic budgeting* pada pemerintah kota binjai baru berjalan 1 (satu) tahun sehingga ukuran pengaruhnya belum dapat dinilai secara maksimal dan hal tersebut diperjelas dengan hasil hubungan antara *electronic budgeting* dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi juga bernilai rendah. Selanjutnya oleh Atik Andhayani (2020) dengan judul *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: e-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. penelitian deskriptif kualitatif ini adalah pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah dalam hal *e-Budgeting* dari awal rancangan, pelaksanaan telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan untuk perbaikan. Penelitian selanjutnya oleh Rama Andika Thio Rahman (2018) dengan judul *Analisis Implemetasi e-Budgeting Dengan Menggunakan Model CIPP Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Hasil penelitian deskriptif kualitatif ini adalah implementasi e-Budgeting dengan menggunakan CIPP layak untuk dilanjutkan karena dapat mengidentifikasi dari berbagai sudut yaitu dari konteks, masukan, proses, dan hasil yang diberikan dari kebijakan tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* pada masa pandemi *Covid-19* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni teori pelaksanaan menurut Rohman dan akuntabilitas keuangan Menurut Chabib Sholeh dan Rohcmansjah Heru.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem *electronic budgeting* pada masa pandemi *Covid-19* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengetahui kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* pada masa pandemi *Covid-19* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan sistem *electronic budgeting* pada masa pandemi *Covid-19* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive* sampling terdiri atas Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, Sekertaris BPKD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Anggaran BPKD Provinsi DKI Jakarta, Operator *Electronic Budgeting*, dan Penyelia Bidang Anggaran. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara semiterstruktur dan observasi nonpartisipasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat Charles O Jones mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, *display* data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* pada masa pandemi *Covid-19* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori pelaksanaan menurut Rohman dan akuntabilitas keuangan Menurut Chabib Sholeh dan Rohcmansjah Heru. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Kepemimpinan

1. Komitmen yang dimiliki terkait pelaksanaan *electronic budgeting*

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa komitmen terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* sudah efektif

2. Dedikasi yang ditunjukkan terkait pelaksanaan *electronic budgeting*

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa dedikasi terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah efektif.

3. Memiliki rasa tanggung jawab atas pelaksanaan *electronic budgeting*.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa tanggung jawab terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah efektif.

3.2. Komunikasi

1. Penyampaian informasi terkait tujuan pelaksanaan *electronic budgeting*

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta kurang efektif.

2. Pembagian tugas terkait pelaksanaan *electronic budgeting*. Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa pembagian tugas terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* sudah efektif.

3. Penyampaian tujuan terkait pelaksanaan *electronic budgeting*. Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa penyampaian tujuan terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* sudah efektif.

3.3. Sumber daya

1. Individu / staf dalam pelaksanaan *electronic budgeting*

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa individu / staf terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah efektif

2. Kewenangan terkait pelaksanaan *electronic budgeting*

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa kewenangan terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah efektif.

3.4. Proses Perumusan

1. Diakses sehingga pihak eksternal dapat mengetahui terkait pengelolaan keuangan dengan sistem *electronic budgeting*

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa terkait akses pelaksanaan sistem *electronic budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga pihak eksternal dapat mengetahui sudah efektif.

3.5. Keberhasilan

1. Dikomunikasikan/koordinasi secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait pelaksanaan sistem *electronic budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah efektif.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dimensi dan indikator dalam Pelaksanaan sistem *electronic budgeting* pada masa pandemi *Covid-19* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil pembahasan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PEMBAHASAN	
(1)	(2)	(3)	
1	Kepemimpinan	3 indikator	- Sudah efektif (3)
2	Komunikasi	3 indikator	- Sudah efektif (2)

			- Kurang efektif (1)
3	Sumber Daya	2 indikator	- Sudah efektif (2)
4	Motivasi	1 indikator	- Cukup efektif (1)
5	Proses Perumusan	1 indikator	- Sudah efektif (1)
6	Keberhasilan	1 indikator	-Sudah efektif (1)

3.4. Hambatan Dalam Pelaksanaan *Electronic Budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Program atau perangkat lunak (*software*) *electronic budgeting* yang cukup sulit dioperasikan. Sebagai operator *electronic budgeting* setelah skpd maupun opd menginput dan memverifikasi data yang menggunakan *electronic budgeting* di Badan Pengelola Keuangan Daerah dilihat dari langkah-langkah maupun panduan yang harus dikerjakan terlalu banyak dan sulit, dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam memahami sistem tersebut, sehingga hal itu merupakan salah satu kendala yang dialami di lapangan.
- b. Belum tersedianya petunjuk teknis (modul) dalam pengoperasian sistem *electronic budgeting* dalam rangka penyusunan anggaran.

Hambatan yang terjadi terkait penggunaan sistem *electronic budgeting* operator dalam bekerja belum dilengkapi buku pedoman petunjuk (modul) mengenai pengoperasian sistem *electronic budgeting* dalam rangka penyusunan anggaran, sehingga hal tersebut dapat mempersulit operator di dalam penginputan data maupun verifikasi data, karena berdasarkan keterangan operator di lapangan dalam koordinasi pelaksanaan sistem pengelolaan anggaran berbasis teknologi tersebut lebih kepada sosialisasi ataupun surat edaran, hal ini mengakibatkan format mengenai penginputan anggaran yang sering kali berubah-ubah dan waktu yang dibutuhkan dalam menginput data menjadi lebih lama yang dikarenakan operator harus belajar secara otodidak, hal itu berimbas juga terhadap skpd terkait sehingga tentu saja dapat mempengaruhi proses penyusunan anggaran yakni efisiensi waktu.

- c. Situs atau *website* yang terkadang sulit di akses

Ditemukan hambatan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran melalui *electronic budgeting* yaitu pada saat waktu pelaksanaan penyusunan anggaran dilakukan secara bersama, situs atau *website* *electronic budgeting* pada jam tertentu terutama pada jam kerja yaitu pukul 08.00 sampai 16.00 sulit diakses dan bahkan tidak bisa diakses, yang disebabkan banyaknya skpd terkait mengakses atau menginput data pada saat jam-jam tersebut, sehingga dari keterangan pegawai di lapangan banyaknya pegawai menambah jam kerja sampai melebihi waktu jam kerja yang telah ditetapkan. Jadi, semakin banyak pihak yang mengakses *website* ini maka akses untuk membuka *website* *electronic budgeting* juga semakin sulit. Sehingga hal ini menjadi penghambat dalam proses penyusunan anggaran melalui sistem tersebut.

- d. Kualitas Sumber daya manusia yang kurang konsisten dan teliti dalam penginputan data maupun kualifikasi data

Terkait hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penginputan anggaran menggunakan *electronic budgeting* masih kurangnya sumber daya manusia yang tersedia terkait konsistensi dan ketelitian, dimana masih banyaknya pegawai atau skpd terkait masih harus diingatkan kembali batas waktu yang telah ditentukan. Sumber daya manusia di BPKD bagian anggaran terkait pelaksanaan di lapangan tingkat konsistensi terkait pengusulan maupun penginputan kode rekening maupun pagu anggaran terdapat beberapa SKPD yang mengalami hambatan, sehingga apabila terdapat revisi sumber daya yang tersedia membutuhkan tenaga dan waktu yang ekstra untuk memberikan sosialisasi yang lebih kepada SKPD terkait yang mengalami hambatan tersebut. Kesalahan yang biasanya dilakukan oleh SKPD yaitu keterlambatan dalam pengusulan maupun penginputan kode rekening, kemudian kesalahan dalam login maupun kesalahan teknis lainnya seperti gagal dalam men-save data yang telah diinput. Semua itu merupakan hal yang menjadi wewenang bagian anggaran untuk mengurus kode rekening dalam kegiatan yang diajukan, sehingga dalam pelaksanaannya sumber daya / staf yang tersedia membutuhkan waktu yang banyak dan tidak dipungkiri sumber daya yang di bagian anggaran ini lembur untuk memperbaiki revisi-revisi tersebut sehingga memberatkan dipihak yang merevisi. Hal itu merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan budaya kerja bagi pegawai yang baik sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

3.6. Upaya Yang Dilakukan Yang Dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Electronic Budgeting di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Hambatan terkait Perangkat Lunak (*software*) *electronic budgeting* yang cukup sulit dioperasikan Adapun dalam mengatasi hambatan terkait sulitnya pengoperasian perangkat lunak (software) dengan cara berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait terutama dengan tenaga ahli dalam penataan dan pengembangan sistem informasi penganggaran berkaitan dengan software *e-budgeting* atau tenaga ahli yang berpengalaman di bidang informasi teknologi dengan konsultasi maupun pelatihan dengan mengikutsertakan pegawai yang berhubungan langsung dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

b. Hambatan terkait Belum tersedianya pedoman petunjuk teknis (modul) pengoperasian sistem *electronic budgeting* dalam rangka penyusunan anggaran

Berkoordinasi dengan instansi vertikal yang terkait dengan *e-budgeting* serta berkoordinasi dengan instansi horizontal guna memecahkan masalah terkait dengan pengoperasian *e-budgeting*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPKD juga terus melakukan evaluasi dengan melakukan pelatihan maupun sosialisasi dan koordinasi kepada pengguna *e-budgeting* yaitu pegawai BPKD sendiri maupun terhadap skpd terkait. Pelatihan maupun sosialisasi yang diberikan secara bertahap, serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap pegawai maupun skpd terkait melalui penambahan insentif maupun pemberian penghargaan kepada setiap pegawai atau skpd yang memiliki inovasi terkait dalam mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan serta sosialisasi berkaitan dengan fitur-fitur atau inovasi-inovasi yang baru untuk menyempurnakan sistem *e-budgeting*.

c. Hambatan terkait Website *electronic budgeting* yang terkadang sulit diakses

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki kewenangan terkait pembinaan, pengkoordinasian, monitoring, dan pengendalian terkait sistem pengelolaan keuangan berbasis sistem dan teknologi melalui *electronic budgeting* selalu mengimbau dan berkoordinasi terhadap pegawai BPKD itu sendiri maupun terhadap skpd terkait agar melaksanakan penginputan sesuai dengan waktunya, sehingga dapat menghindari waktu-waktu penginputan secara bersamaan yang dapat mempengaruhi jaringan internet serta website terkait mengalami eror atau overload. Kemudian berkoordinasi/ berkonsultasi secara langsung kepada BPKD oleh bendahara skpd terkait untuk melaporkan permasalahan tersebut.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Sistem *electronic budgeting* merupakan inovasi sistem dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengampu program tersebut. Tujuannya yakni untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan sehingga dapat terciptanya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. dalam pelaksanaannya sistem *electronic budgeting* yang dijalankan oleh Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berjalan dan memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berkurangnya manipulasi anggaran yang dilakukan oknum pegawai serta berkurangnya tingkat korupsi yang terjadi. Penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian oleh Reviona Juliar, Neneng Dahtiah (2020) bahwa penerapan e-Budgeting pada penyusunan APBD di pemkot Bandung sudah efektif dan efisien karena sudah serta juga dalam penelitian Rama Andika Thio Rahman (2018) dimana implementasi *Budgeting* Dengan Menggunakan Model CIPP yang juga pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berjalan efektif dilihat dari konteks masukan, proses, dan hasil dari kebijakan atau program tersebut.

Dalam pelaksanaan sistem *electronic budgeting* terutama pada masa pandemi ini sendiri pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang terjadi. perangkat lunak (software) *electronic budgeting* yang cukup sulit dioperasikan, belum tersedianya pedoman petunjuk teknis (modul) pengoperasian sistem *electronic budgeting* dalam rangka penyusunan anggaran, website *electronic budgeting* yang terkadang sulit diakses, dan sumber daya manusia yang kurang konsisten dan teliti. Dalam hal ini sumber daya sendiri sama halnya dengan penelitian Rizka dan Desy (2017) dimana dengan penerapan *E-Budgeting* ini lebih lanjutnya meningkatkan sistem kualitas sumber daya yang ada untuk mencapai *good governance* di Kota Surabaya. Dalam penelitian itu tingkat pelaksanaan dipersempit dengan beberapa faktor yakni kepemimpinan, komunikasi, sumber daya, motivasi, keberhasilan, dan proses perumusan yang secara keseluruhan terbilang sebelumnya sudah efektif namun belum secara maksimal seperti halnya dalam penelitian Nasution dan Atika (2019) yang mana ketidakmaksimalan dari implementasi *electronic budgeting* berdasar dari keberhasilan yang masih belum tercapai karena pemerintah Kota Binjai sendiri baru setahun menerapkan program ini dibanding DKI Jakarta sebagaimana ditambah pula dengan keadaan DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Dalam pelaksanaannya pula sistem *electronic budgeting* di DKI Jakarta yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada penerapannya apalagi selama pandemi terdapat aturan-aturan yang harus

menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini seperti halnya dalam penelitian Atik Andhayani (2020) mengenai strategi dalam penerapan *e-budgeting* yang mengalami perubahan dari rancangan awal untuk menyempurnakan terlaksananya sistem tersebut.

Harapannya dengan adanya sistem *electronic budgeting* terutama di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya dapat terjaganya akuntabilitas public, menekan resiko korupsi, dokumentasi data yang lebih efektif serta mempermudah evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.s

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan pelaksanaan sistem *electronic budgeting* pada masa pandemi *covid-19* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah efektif. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *electronic budgeting* di Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu perangkat lunak (software) *electronic budgeting* yang cukup sulit dioperasikan, belum tersedianya pedoman petunjuk teknis (modul) pengoperasian sistem *electronic budgeting* dalam rangka penyusunan anggaran, website *electronic budgeting* yang terkadang sulit diakses, dan sumber daya manusia yang kurang konsisten dan teliti. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mengatasi hambatan adalah berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait terutama dengan tenaga ahli dalam penataan dan pengembangan sistem informasi penganggaran berkaitan dengan *software e-budgeting*, berkoordinasi dengan instansi vertikal yang terkait dengan *e-budgeting* serta berkoordinasi dengan instansi horizontal guna memecahkan masalah terkait dengan pengoperasian *e-budgeting*. Melakukan evaluasi dengan melakukan pelatihan maupun sosialisasi dan koordinasi kepada pengguna *electronic budgeting*, mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki serta inovasi terkait dalam mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan serta sosialisasi berkaitan dengan fitur-fitur atau inovasi-inovasi yang baru untuk menyempurnakan sistem tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki kewenangan terkait pembinaan, pengkoordinasian, monitoring, dan pengendalian terkait sistem pengelolaan keuangan berbasis sistem *electronic budgeting* terus mengimbau dan berkoordinasi agar melaksanakan penginputan sesuai dengan waktunya, dan Badan Pengeelora Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menciptakan budaya kerja yang baik antar pegawai dengan saling mensupport dan mendukung satu sama lain, memberikan penghargaan, kemudian terus memberikan imbauan maupun peringatan terhadap pegawai maupun skpd terkait.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori pelaksanaan menurut Rohman dan akuntabilitas keuangan Menurut Chabib Sholeh dan Rohcmansjah Heru.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* pada masa pandemi *Covid-19* dalam

meningkatkan akuntabilitas keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Roikan. (2019). *Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik*. Surabaya: Kencana.
- Fischer Frank, Miller Gerald J, S. M. S. (2021). *Metode Kualitatif Interpretif dan Penelitian Kualitatif dalam Kebijakan Publik*. NUSAMEDIA.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Haryono, Cosmas Gatot. 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak Rohman, Abd. (2017). *Dasar – Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media
- Moenek, R. S. D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Negara*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Salim. dkk. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis Kencana*
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*. Bandung: Nusa Media.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service
- Widi, R. K. (2018). *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Andhayani, A. (2020). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 183–193. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>
- Gunawan, D. R. (2016). *Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>

- Juliar, R., & Dahtiah, N. (2020). *Implementasi Kebijakan dan Sistem Pengendalian Manajemen E-Budgeting dalam mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)*. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1),162–172.
- Khosiah, Hajrah, S. (2017). *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 4(2), 9–15.
- Miftah, M. (2018). *Model Dan Format Analisis Kebutuhan Multimedia Pembelajaran Interaktif*. Jurnal Teknodik, 13(1), 095. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v13i1.443>
- Nasution, D. A. D. (2018). *Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 149–162. <https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26>
- Nasution, A. P., & Atika. (2019). *Implementasi E-Budgeting sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai*. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 9(2),1–13. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/454>
- Nasution, fadlilah hamni. (2016). *Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kualitatif*. 148, 148–162.
- Pratiwi, N. I. (2017). *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 1(2), 202–224
- Rama A. T. R., Gugus I., Rosidi. 2018. *Analisis Implementasi E-Budgeting Dengan Menggunakan Model CIPP Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Journal Sistem Informasi. Vol. 14 No. 2
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). *Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak*. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Sondak, hesti sandi, Taroreh, n rita, & Uhing, Y. (2019). *Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(1), 671–680. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22478>
- <https://bpkd.jakarta.go.id/keuangan-daerah> (LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018-2020)
- <https://www.merdeka.com/jakarta/sistem-e-budgeting-ahok-ampuh-memberantas-dana-siluman.html>
- <https://tirto.id/polemik-anggaran-lem-aibon-dan-daftar-kejanggalan-r-apbd-dki-2020-ekQ1>
- <https://www.pinterpolitik.com/ruang-publik/menyoal-sistem-e-budgeting-dki-jakarta> diakses pinter politik Thursday, December 19, 2019 11:30
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Atau Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Melalui *Electronic budgeting*

